

Sistem Multi Partai Indonesia Dan Sistem Perwakilan Politik Kelurahan Dompok Tanjung Pinang

Jauzari Helmi¹, Reski Apriyani², Syahriful Ahyar³, Raja Nur Hafriza⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang

Korespondensi penulis : jzrhelmy@gmail.com¹, yapri8390@gmail.com², syahrifulahyar21@gmail.com³,
hafrizaraja@gmail.com⁴

ABSTRACT. *The aim of this research is to understand the multi-party system in Indonesia, the political representation system in Indonesia, and the relationship between these systems with the political dynamics in Kelurahan Dompok, Tanjung Pinang. A descriptive qualitative research method was employed, utilizing interviews, observations, and document analysis to gain an in-depth understanding of the phenomenon. The results indicate that Indonesia's political system provides opportunities for various political parties to participate in the political process and elections. At the local level, the relationship between political parties, the community, and the government is crucial in the context of democracy. Although the dynamics of political money influence the public's perception of assistance provided by candidates, the principles of political equality and freedom remain the foundation of the political representation system aimed at forming a government that is responsive to the needs of the people.*

Keywords: *Multi-party system, Political representation system, Political parties in Indonesia*

ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem multi partai Indonesia, sistem perwakilan politik di Indonesia, dan hubungan antara sistem tersebut dengan dinamika politik di Kelurahan Dompok, Tanjung Pinang. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia memberikan kesempatan bagi berbagai partai politik untuk berperan dalam proses politik dan pemilihan. Di tingkat lokal, hubungan antara partai politik, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam konteks demokrasi. Meskipun dinamika politik uang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh calon, prinsip kesetaraan dan kebebasan politik tetap menjadi dasar dalam sistem perwakilan politik yang bertujuan membentuk pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Sistem multi partai, Sistem perwakilan politik, Partai politik di Indonesia

PENDAHULUAN

Sejarah kolonialisme Indonesia sebelum kemerdekaan dan pengaruh politik penjajah Belanda mencerminkan kompleksitas politik, dinamika sosial budaya, dan dinamika politik di sistem perwakilan politik Indonesia. Selama proses kolonialisme, struktur politik yang awalnya tidak demokratis dan otoriter dibentuk. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah menciptakan identitas nasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Organisasi kebangsaan dan politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) berkontribusi besar pada perjuangan tersebut. Indonesia memiliki sistem partai yang beragam setelah merdeka pada tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah PNI, Masyumi (Partai Islam), PKI (Partai Komunis Indonesia), dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) (Cecep dkk, 2024).

Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki Orde Lama, yang ditandai dengan dominasi Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam politik, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Golongan Karya (Golkar) di bawah pemerintahan Soekarno. Era Orde Baru, yang dimulai dengan pemerintahan Soeharto pada tahun 1966, dimulai dengan otoritarianisme, dengan Golkar sebagai partai tunggal yang memerintah. Partisi politik lainnya tidak memiliki banyak kekuatan atau aktivitas. Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 memulai era Reformasi di Indonesia. Salah satu bagian dari reformasi politik ini adalah liberalisasi sistem partai politik, yang membuka jalan bagi partai baru untuk muncul, dan meningkatkan peran demokrasi dalam proses politik. Saat ini, sistem multipartai Indonesia sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Banyak perspektif politik dan kepentingan masyarakat dapat diwakili dalam proses politik berkat sistem ini (Pakaya & Dali, 2021).

Sistem Perwakilan Politik di Indonesia, Perwakilan politik di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan dilakukan secara berkala untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. DPR merupakan lembaga legislatif tingkat nasional yang mewakili rakyat Indonesia. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki DPRD yang bertugas sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal. Anggotanya juga dipilih melalui pemilihan umum. Sistem perwakilan politik di Indonesia juga melibatkan partisipasi aktif dari partai politik, kelompok masyarakat, dan individu dalam proses politik, termasuk kampanye, pemilihan umum, dan advokasi kebijakan. Partai politik memainkan peran kunci dalam sistem perwakilan politik Indonesia (Tammu, 2023).

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) BPS (2021) menunjukkan sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap politik uang sebagai hal wajar, dengan sekitar 22% responden pada 2020 dan 2022 merasa demikian. Data Bawaslu Kepulauan Riau (2022) mencatat 7 kasus dugaan politik uang selama Pemilu 2019, dengan Kelurahan Dompok di Tanjungpinang teridentifikasi memiliki kasus tertinggi. Politik uang, sebagai bentuk korupsi elektoral, melibatkan pembelian suara, janji-janji, atau pemaksaan. Interaksi antara calon dan pemilih dalam Pemilu menciptakan fenomena ini. Teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead (2014) menjelaskan bagaimana simbol politik uang terbentuk di masyarakat. Fenomena ini, meski hanya puncak gunung es, sudah menjadi rahasia umum, bahkan dimaknai oleh

sebagian masyarakat sebagai bantuan dari calon. Penelitian ini bertujuan untuk memahami simbol politik uang di masyarakat Kelurahan Dompok.

METODE

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk memberikan gambaran rinci tentang fenomena tertentu. Metode ini menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami situasi atau peristiwa secara mendalam dari perspektif partisipan. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan "apa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi, bukan menjelaskan "mengapa". Hasilnya adalah deskripsi kaya dan kontekstual yang memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Kredibilitas data dijaga melalui teknik seperti triangulasi dan member checking untuk memastikan validitas temuan.

PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Multi Partai Indonesia dan Sistem Perwakilan Politik Di Indonesia

Sistem multi partai adalah salah satu tipe sistem kepartaian di mana lebih dari dua partai politik bersaing dalam pemilu untuk mendapatkan kekuasaan. Andrew Heywood menyatakan bahwa sistem partai politik adalah jaringan interaksi antar partai dalam sistem politik. Kata kunci untuk membedakan tipe sistem kepartaian adalah jumlah partai politik yang eksis. Duverger (1954) mengenalkan parameter ini, membedakan sistem politik menjadi tiga: sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai. Jika ada satu partai dominan, itu sistem partai tunggal; dua partai, sistem dua partai; lebih dari dua, sistem multi partai (Alfatih, 2022).

Sistem perwakilan memungkinkan warga negara memilih wakil untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan umum. Konsep ini muncul dari Yunani kuno, di mana setiap warga memiliki hak memilih wakil di legislatif. Sistem ini berkembang menjadi lebih kompleks, dengan pemilu rutin diadakan untuk memilih perwakilan di parlemen (Anggita, 2023). Prinsip kesetaraan dan kebebasan politik menjadi dasar, dan wakil bertugas melayani konstituennya dengan mewakili kehendak rakyat. Sistem ini bertujuan membentuk pemerintahan responsif yang efektif memenuhi kebutuhan rakyat.

Jenis-Jenis Partai Politik Indonesia

Di Indonesia, partai politik dibagi menjadi tiga jenis: partai politik nasional parlemen, partai politik lokal parlemen, dan partai politik non-parlemen. Partai politik nasional parlemen adalah partai yang memiliki perwakilan di parlemen nasional dan daerah, seperti PDI-P,

Golkar, Gerindra, PKB, PKS, dan NasDem. Partai politik lokal parlemen hanya memiliki perwakilan di parlemen daerah, contohnya Partai Aceh, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Berkarya. Sementara itu, partai politik non-parlemen adalah partai yang tidak memiliki perwakilan di parlemen nasional maupun daerah, seperti Partai Buruh, Partai Gelora, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Menjelang pemilu 14 Februari 2024, KPU telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh untuk bersaing dalam pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Sabarudin, 2024).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada 1988 dan dikenal dengan tokoh seperti Gus Dur, memperoleh 9,69% suara pada Pemilu 2019 dengan 58 kursi di DPR RI. Partai Gerindra, didirikan oleh Prabowo Subianto pada 2008, meraih 12,57% suara pada Pemilu 2019 dengan 78 kursi. PDI-P, dideklarasikan oleh Megawati Soekarnoputri pada 1999, menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2019 dengan 19,33% suara atau 128 kursi. Golkar, salah satu partai tertua di Indonesia, yang berkuasa selama 32 tahun di era Soeharto, memperoleh 12,31% suara pada Pemilu 2019 dengan 85 kursi. Nasdem, dideklarasikan pada 2011, meraih 9,05% suara pada Pemilu 2019 dengan 59 kursi. Partai Buruh, didirikan pada 1998 dan dihidupkan kembali pada 2021 oleh Said Iqbal, serta Partai Gelora, didirikan pada 2019 oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah, adalah partai-partai baru yang berusaha mendapatkan kursi di parlemen (Alhamdi, 2022).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), didirikan pada 1998, meraih 8,21% suara pada Pemilu 2019 dengan 50 kursi. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dideklarasikan pada 2021 oleh loyalis Anas Urbaningrum, dan Partai Hanura, didirikan pada 2006 oleh Wiranto, yang tidak lolos parlemen pada Pemilu 2019. Partai Garuda, dideklarasikan pada 2015, juga gagal melampaui ambang batas parlemen pada 2019. Partai Amanat Nasional (PAN), identik dengan Amien Rais, meraih 6,84% suara pada Pemilu 2019 dengan 44 kursi. Partai Bulan Bintang (PBB), didirikan oleh Yusril Ihza Mahendra pada 1998, tidak lolos parlemen dalam tiga pemilu terakhir. Partai Demokrat, dideklarasikan pada 2022 dan dikenal dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, memperoleh 7,77% suara pada Pemilu 2019 dengan 54 kursi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), didirikan pada 2014, gagal masuk parlemen pada 2019 dengan 1,85% suara. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo pada 2014, juga tidak lolos ambang batas parlemen pada 2019. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dideklarasikan pada 1973, meraih 4,52% suara pada Pemilu 2019 dengan 19 kursi.

Hubungan sistem multi partai Indonesia dengan sistem perwakilan politik Kelurahan Dompak Tanjung Pinang

Hubungan antara sistem multi partai Indonesia dan sistem perwakilan politik di Kelurahan Dompak, Tanjung Pinang, sangat erat. Sistem multi partai di Indonesia, yang diadopsi pasca Reformasi, memungkinkan berbagai partai politik untuk berperan dalam proses politik dan pemilihan. Ini sejalan dengan sistem perwakilan politik yang berlaku di tingkat lokal, termasuk di Kelurahan Dompak.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di tingkat lokal, seperti Kelurahan Dompak, representasi politik juga didasarkan pada pemilihan wakil rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Biasanya, proses pemilihan dilakukan melalui sistem pemilihan perwakilan berimbang (proportional representation), di mana setiap partai mendapatkan jumlah kursi sesuai dengan persentase suara yang mereka peroleh (Kurniawan & Wahyuni, 2023).

Hal ini berarti bahwa dalam konteks Kelurahan Dompak, partai-partai politik yang berbeda memiliki kesempatan untuk memiliki peran di DPRD, tergantung pada dukungan suara yang mereka terima dari masyarakat. Ini mencerminkan prinsip demokrasi di mana setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili suara dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan proporsi dukungan yang mereka dapatkan dalam pemilihan umum.

Hubungan partai politik dengan masyarakat dan pemerintah Kelurahan Dompak Tanjung Pinang

Hubungan antara partai politik dengan masyarakat dan pemerintah Kelurahan Dompak, Tanjung Pinang, sangat penting dalam konteks demokrasi Indonesia. Partai politik memegang peran yang signifikan dalam menentukan pemimpin melalui pemilu dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pasca Reformasi, Indonesia telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam partisipasi politik, dengan munculnya berbagai partai politik sebagai hasil dari kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Partai politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang ini menetapkan fungsi partai politik dalam politik nasional, termasuk pengaruh mereka dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain itu, partai politik juga berperan dalam pendidikan politik, meningkatkan kesadaran politik, dan membangun pemahaman tentang hak dan kewajiban

warga negara melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan media massa, termasuk platform digital.

Dalam konteks Kelurahan Dompok, masyarakat juga menyadari maksud dan tujuan dari bantuan yang diberikan oleh calon saat Pemilu. Bantuan tersebut, baik berupa uang, sembako, atau materi lainnya, seringkali diberikan dengan tujuan mempengaruhi suara pemilih. Hal ini sering kali dianggap sebagai politik uang, yang pada dasarnya merupakan bentuk korupsi elektoral. Namun, beberapa masyarakat mungkin tidak peduli dengan implikasi masa depan dari menerima bantuan semacam itu. Bagi sebagian, yang terpenting adalah mendapatkan bantuan tersebut, tanpa memikirkan dampaknya pada masa mendatang.

Dalam pemahaman masyarakat, bantuan tersebut dianggap sebagai "pemberian" dari calon, sesuai dengan interpretasi mereka terhadap situasi. Pandangan ini sejalan dengan konsep pikiran (mind) menurut teori sosial George Herbert Mead, di mana pikiran individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan memberikan respon terhadap simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu, interpretasi masyarakat terhadap bantuan politik dalam pemilu dapat dipahami sebagai bagian dari proses interpretasi yang melibatkan pikiran mereka. Meskipun bentuk bantuan bervariasi, interpretasi masyarakat terhadapnya cenderung konsisten, yaitu sebagai "pemberian".

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai sistem multi partai Indonesia dan sistem perwakilan politik di Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik tersebut memberikan kesempatan bagi berbagai partai politik untuk berperan dalam proses politik dan pemilihan. Di tingkat lokal seperti Kelurahan Dompok, hubungan antara partai politik, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam konteks demokrasi. Partai politik memainkan peran signifikan dalam menentukan pemimpin dan mengawasi pemerintahan, sementara masyarakat di Kelurahan Dompok menghadapi dinamika politik uang yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap bantuan yang diberikan oleh calon. Meskipun demikian, prinsip kesetaraan dan kebebasan politik tetap menjadi dasar dalam sistem perwakilan politik yang bertujuan membentuk pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep Suryana, C., Khijami, Z. M., & Ambarwati, N. (2024). *Dinamika politik Islam di Indonesia: Pandangan Politik H. Asep Komarudin*, S. Ag., M. Ud.
- Pakaya, S., & Dali, A. (2021). *Demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia*. *At-Tanwir Law Review*, 1(1), 74-95.
- Tammu, L. (2023). *Analisis yuridis konsep pemilihan umum serentak di Indonesia*. *Doktrina: Journal of Law*, 6(2), 118-139.
- Al-Fatih, S. (2022). *Hukum pemilu dan threshold (Vol. 1)*. Ummpress.
- Anggita, M. (2023). *Peran dan fungsi representasi DPRD DKI Jakarta dalam pengusulan hak interpelasi (Studi kasus pengusulan hak interpelasi Formula E oleh Fraksi PDIP dan PSI) (Disertasi Doktor, Universitas Siliwangi)*.
- Sabarudin, D. (2024). *Anomali bandwagon effect dan momentum partai politik meraih suara pada Pemilu 2024*. *Jurnal Kebangsaan RI*, 1(2), 11-23.
- Al-Hamdi, R. (2022). *Kuasa padat modal: Strategi elektoral partai dalam sistem liberal*. Basabasi.
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2024). *Demokrasi di era digital: Tantangan dan peluang dalam partisipasi politik*. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 61-72.
- Kurniawan, R. R., & Wahyuni, S. (2023). *Politik uang dalam Pemilu 2019: Sebuah kajian interaksionisme simbolik pada masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9179-9192.